



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Sumber-sumber Anggaran dan Metode Penyusunan Anggaran

Muhamad Faozi Kurniawan
FK-KMK UGM

Mei 2025

ugm.ac.id

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Isi paparan

1. Pengantar
2. Sumber Anggaran
3. Penyusunan Anggaran



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

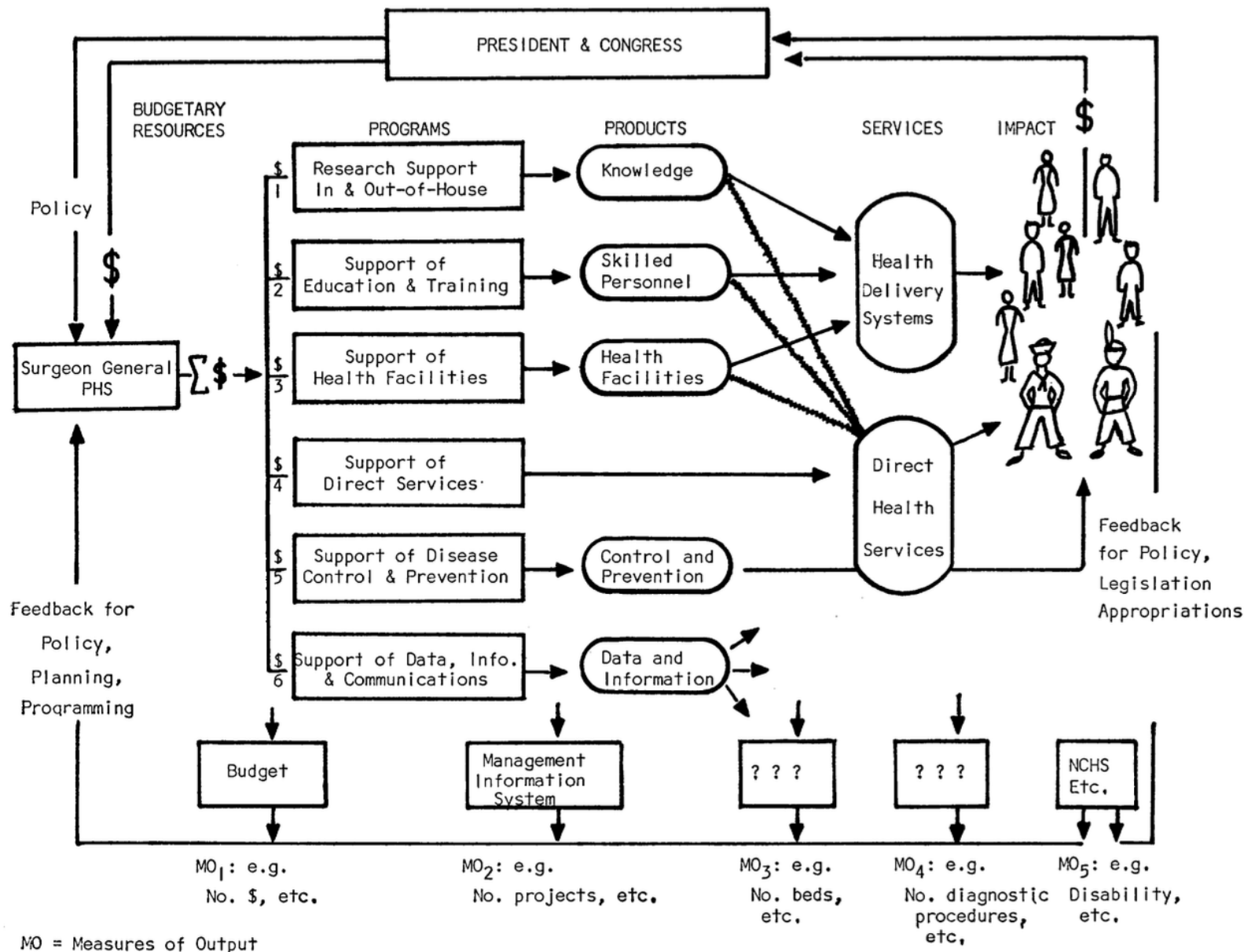
Bagian 1. Pengantar

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

ugm.ac.id

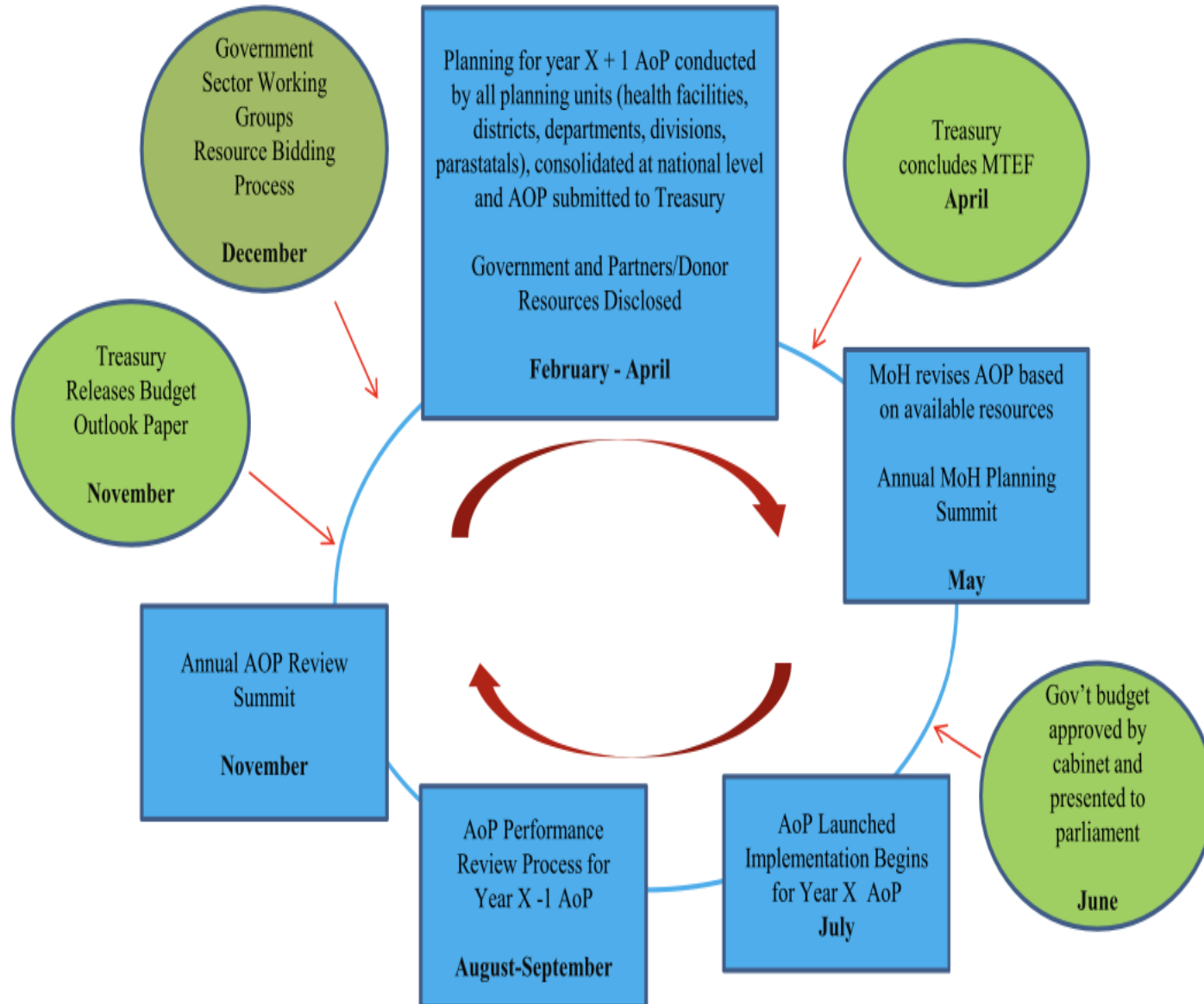


Planning, Programming, and Budgeting in Health



There are four basic resources required in the health endeavor: (1) knowledge, or state of the art; (2) facilities including equipment and supplies; (3) manpower – professional, technical, and supportive; (4) efficiency in use.

Sumber: Kissick, W. L. (1967). Planning, programming, and budgeting in health. *Medical Care*, 5(4), 201-220. <http://www.jstor.org/stable/3762532>



In Kenya “the AOP process and cycle should begin in November each year, at **the AOP review summit where** the sector identifies the priorities for the coming year “

AOP = Annual Operational Plans

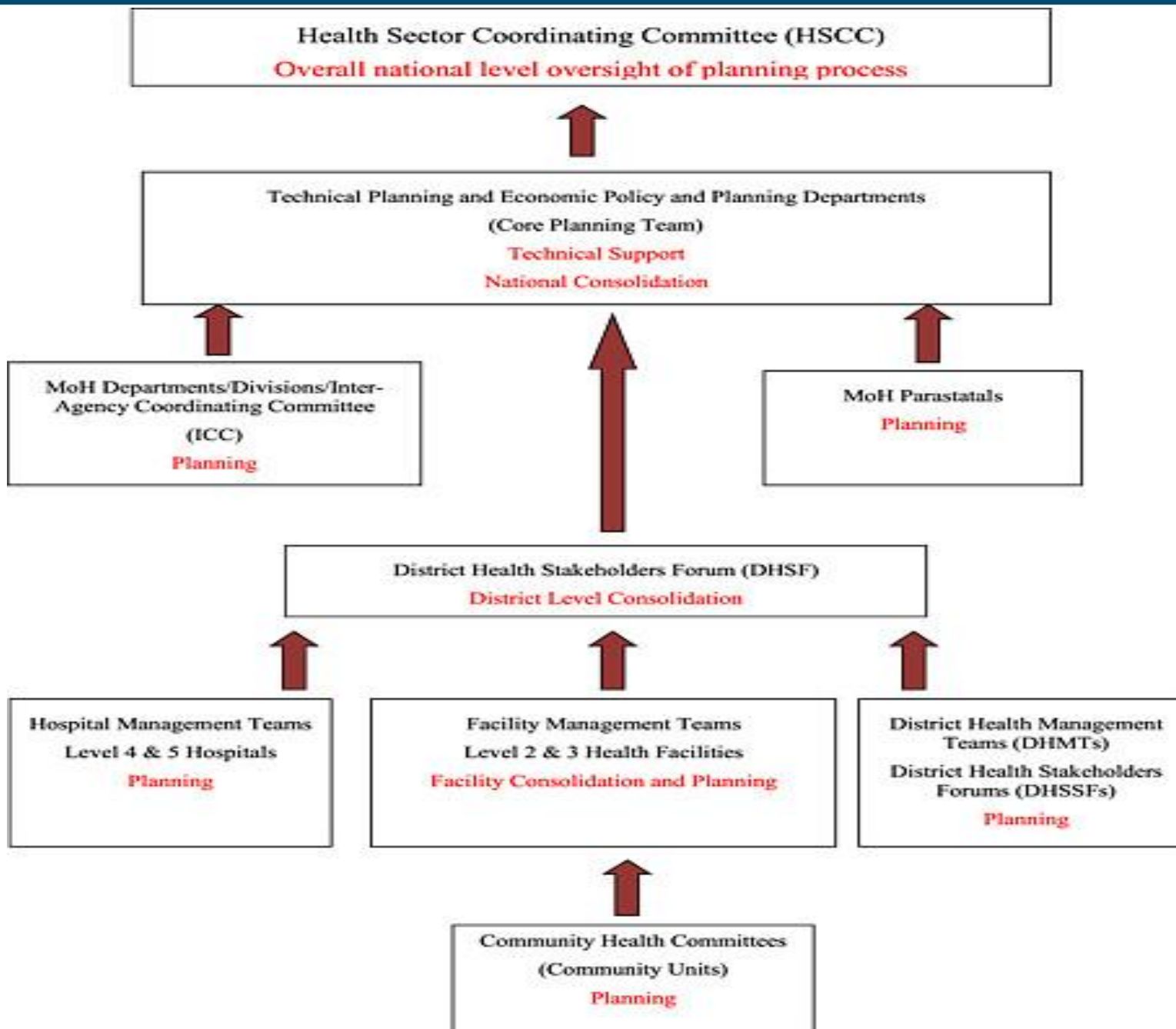
Sumber: Health sector operational planning and budgeting processes in Kenya—“never the twain shall meet”
DO - 10.1002/hpm.2286
https://www.researchgate.net/publication/273785506_Health_sector_operational_planning_and_budgeting_processes_in_Kenya-never_the_twain_shall_meet



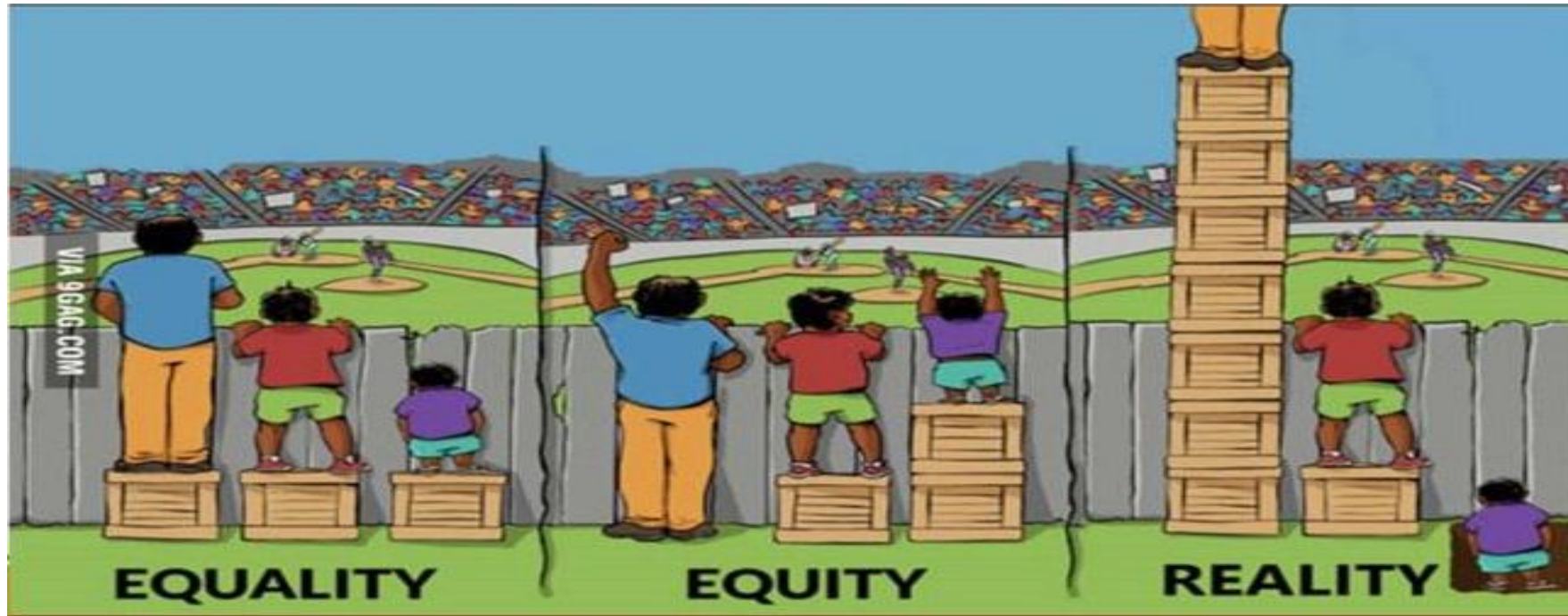
a “bottom-up” fashion

Several factors contributed to this problem including weak Ministry of Health stewardship and institutionalized separation between planning and budgeting processes; a rapidly changing planning and budgeting environment; lack of reliable data to inform target setting and poor participation by key stakeholders in the process including a top-down approach to target setting.

Sumber: Health sector operational planning and budgeting processes in Kenya—“never the twain shall meet”
DO - 10.1002/hpm.2286
https://www.researchgate.net/publication/273785506_Health_sector_operational_planning_and_budgeting_processes_in_Kenya-never_the_twain_shall_meet

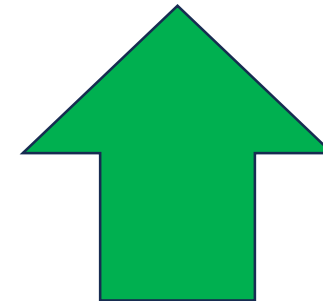


Siapa sasaran program



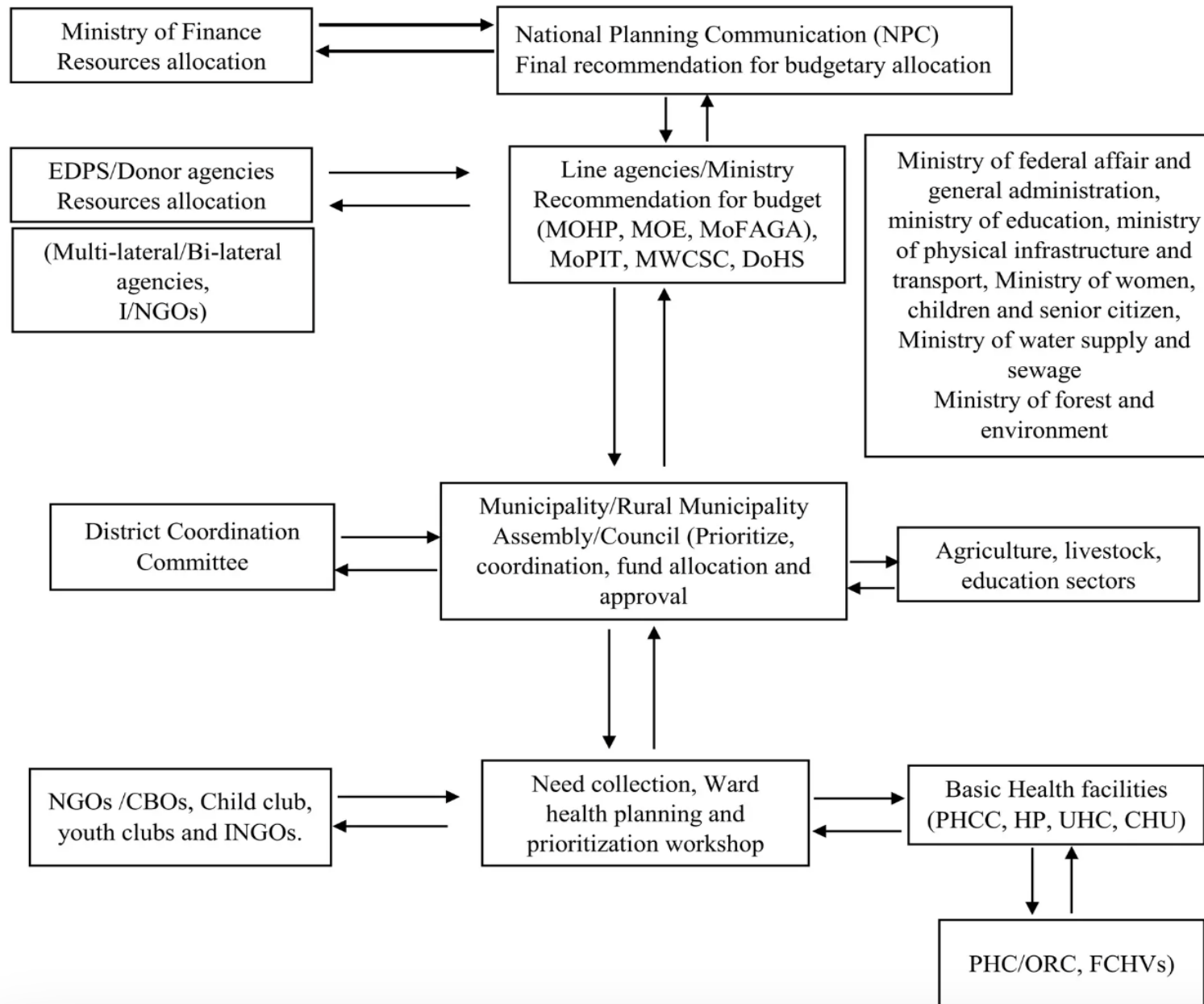
Program yang bisa memenuhi **sasaran**

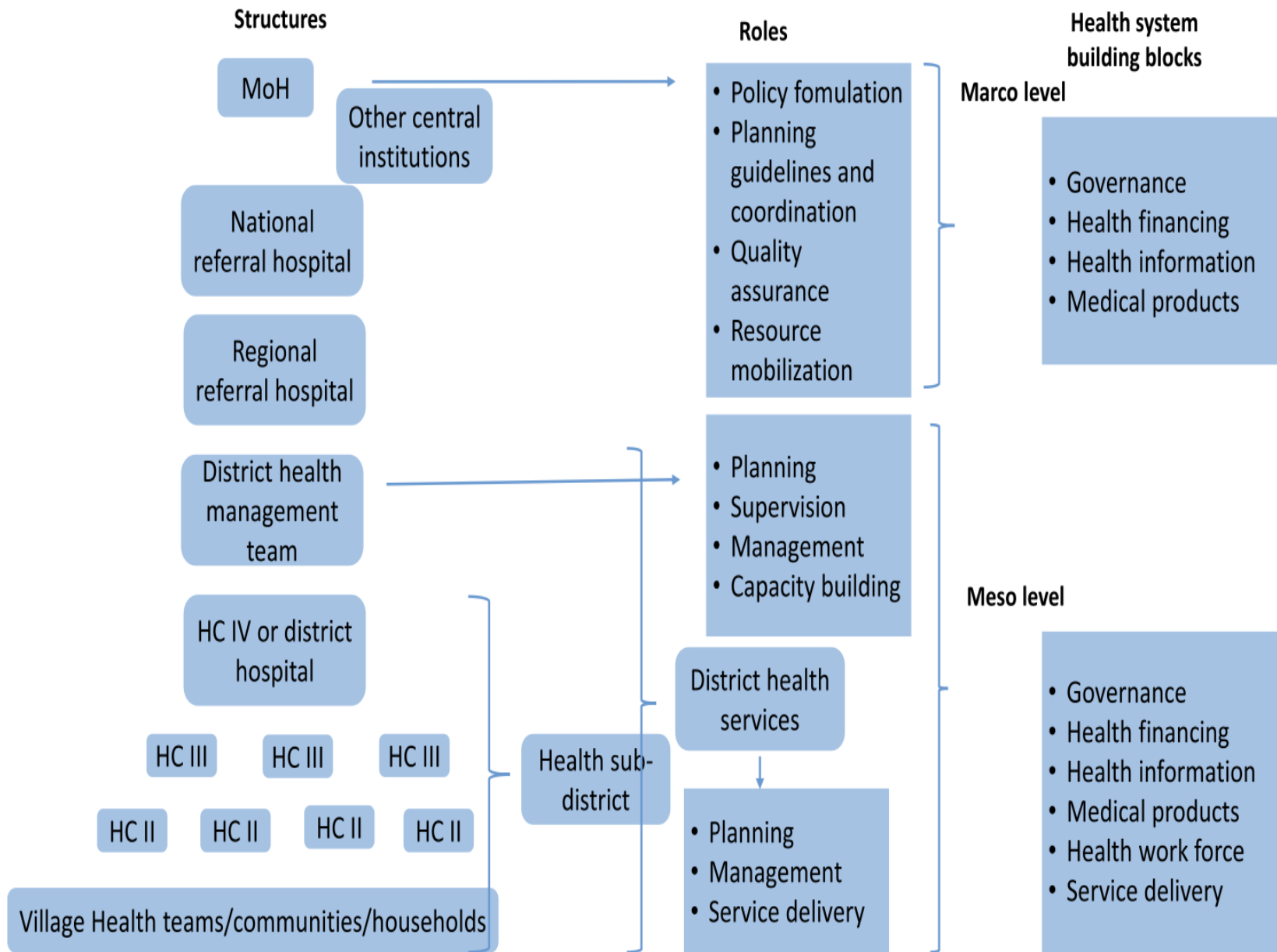
Siapa sasarannya?
Apa yang diberikan kepada sasaran?





Health Planning and Budgeting Structure in local level



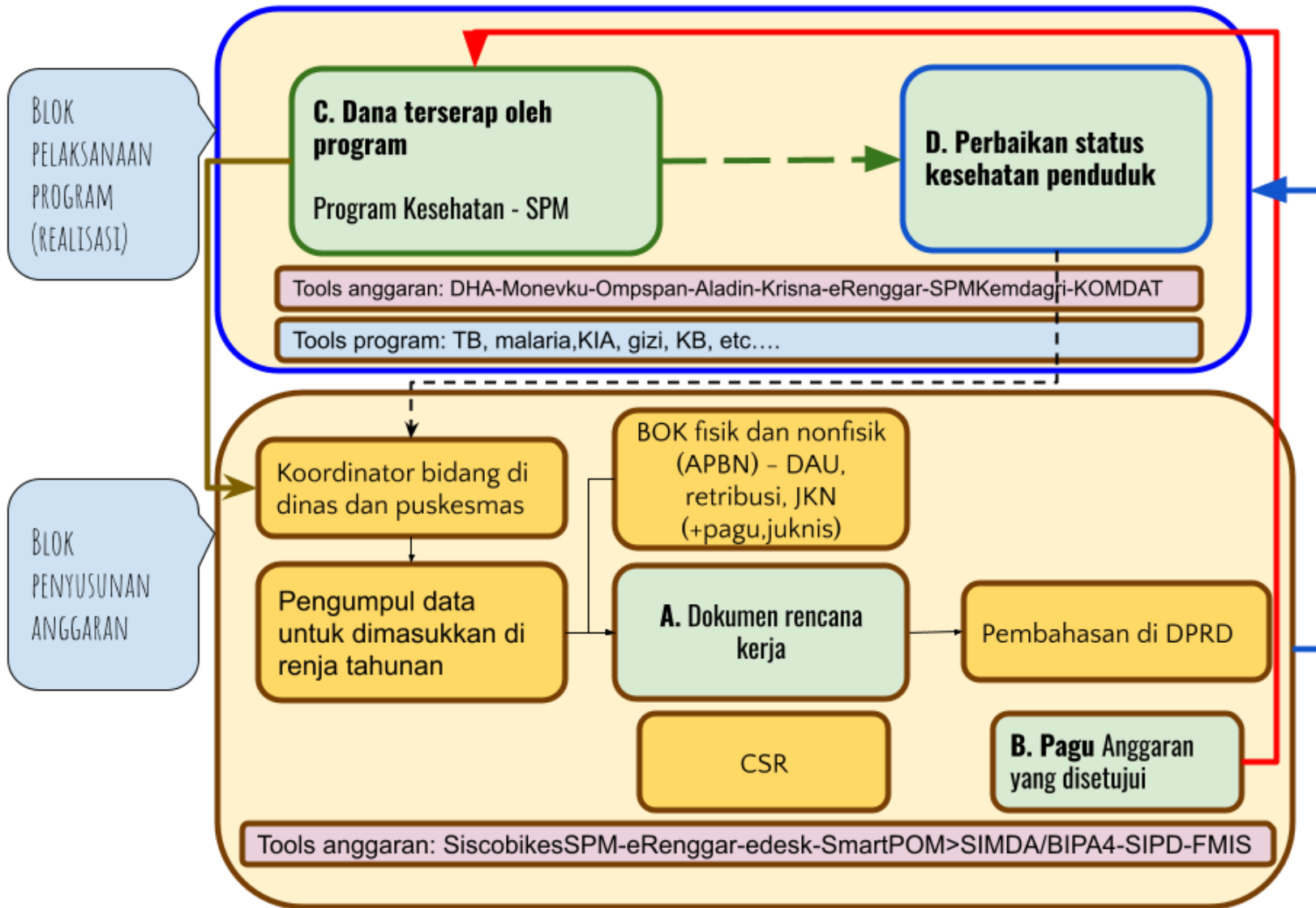


Model Struktur Organisasi Sektor Kesehatan di Uganda

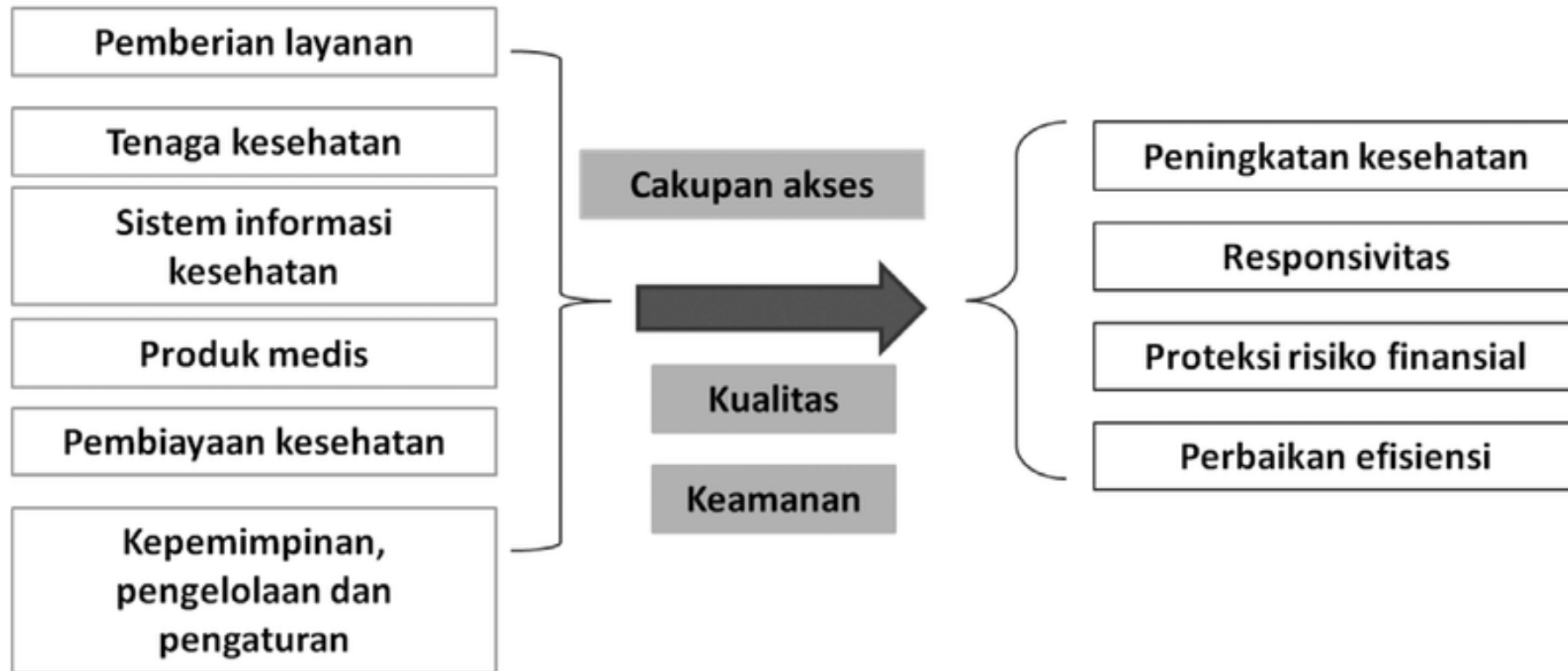
Sumber: Henriksson et.al

<https://doi.org/10.1186/s12961-019-0458-6>

Sejauh mana perencanaan bisa berdampak?



Sistem Kesehatan



Perencanaan Program sampai pelaksanaan belum banyak yang berdasarkan health system

Perbandingan Budget Governance



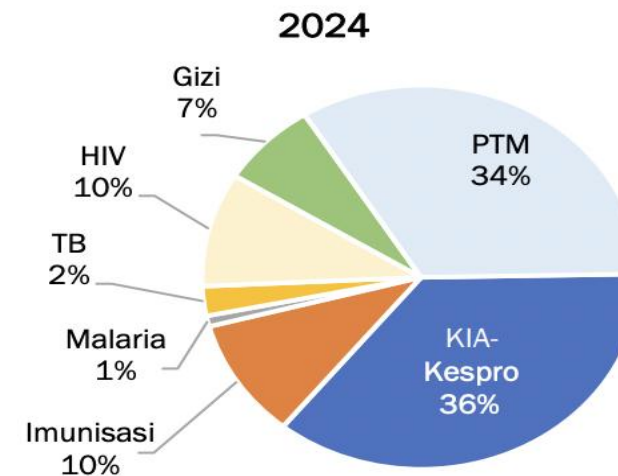
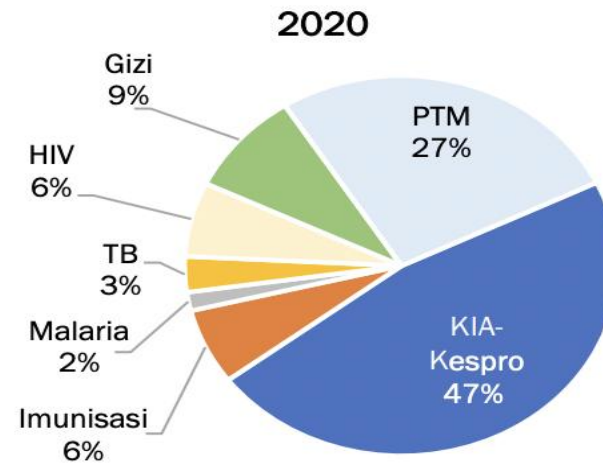
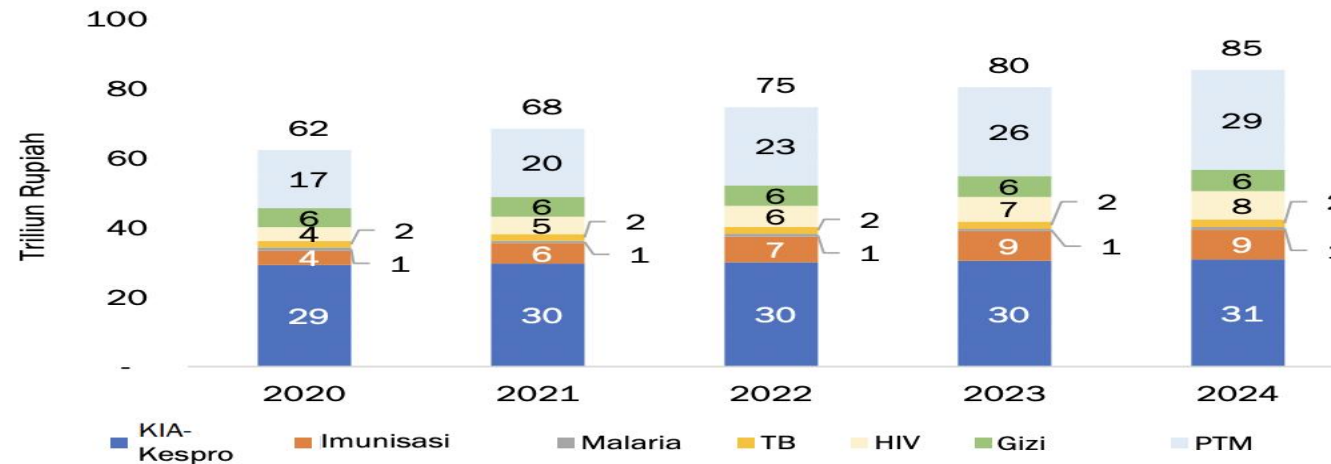
INDONESIA	BELANDA	AMERIKA SERIKAT
1. Penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan	1. Administrative beheer	1. Preparation & submission
2. Penetapan RUU APBN	2. Comptabel beherr	2. Authorization
3. Pelaksanaan UU APBN	3. Controle en begrootingsboekhouding	3. Execution
4. Penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Pengawasan Pelaksanaan UU APBN	4. eindocontrole	4. Audit
5. Penetapan UU PAN		

- Proses mengikuti kebijakan penyusunan anggaran
- Melibatkan eksekutif dalam penyusunan anggaran
- Tidak ditentukan oleh legislatif

Total Biaya untuk Mencapai Target RPJMN Berdasarkan Program Kesehatan



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Sumber: Bappenas, 2020: http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18471-18877_RPJMNCostingReportInd.pdf

Bagian 2. Sumber Anggaran

Sumber Anggaran Kesehatan



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

APBN

APBD

Donor/ Bantuan/ Hibah

Perusahaan

Masyarakat

Revenue Collection

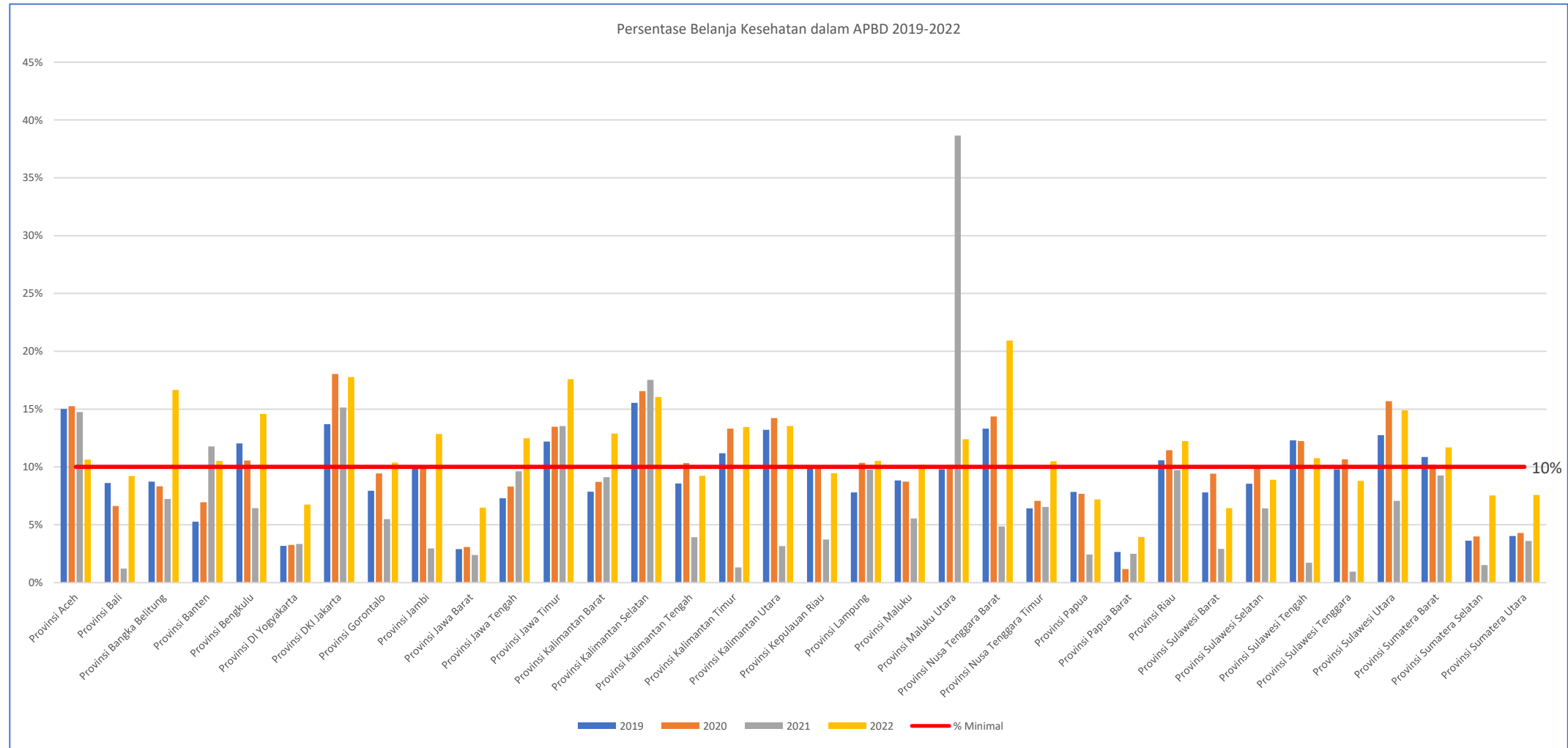
- Sumber dana dari Pemerintah – Pusat dan Daerah
- Kontrol keuangan dan kebijakan dari pemerintah
- Peran swasta dan masyarakat dalam control keuangan
- Bentuk pertanggungjawaban



RASIO BELANJA 10% URUSAN KESEHATAN PROVINSI TERHADAP TOTAL BELANJA DILUAR GAJI APBD



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Sumber: Kemenkeu, olah data, 2022

Menghitung Kebutuhan Dana

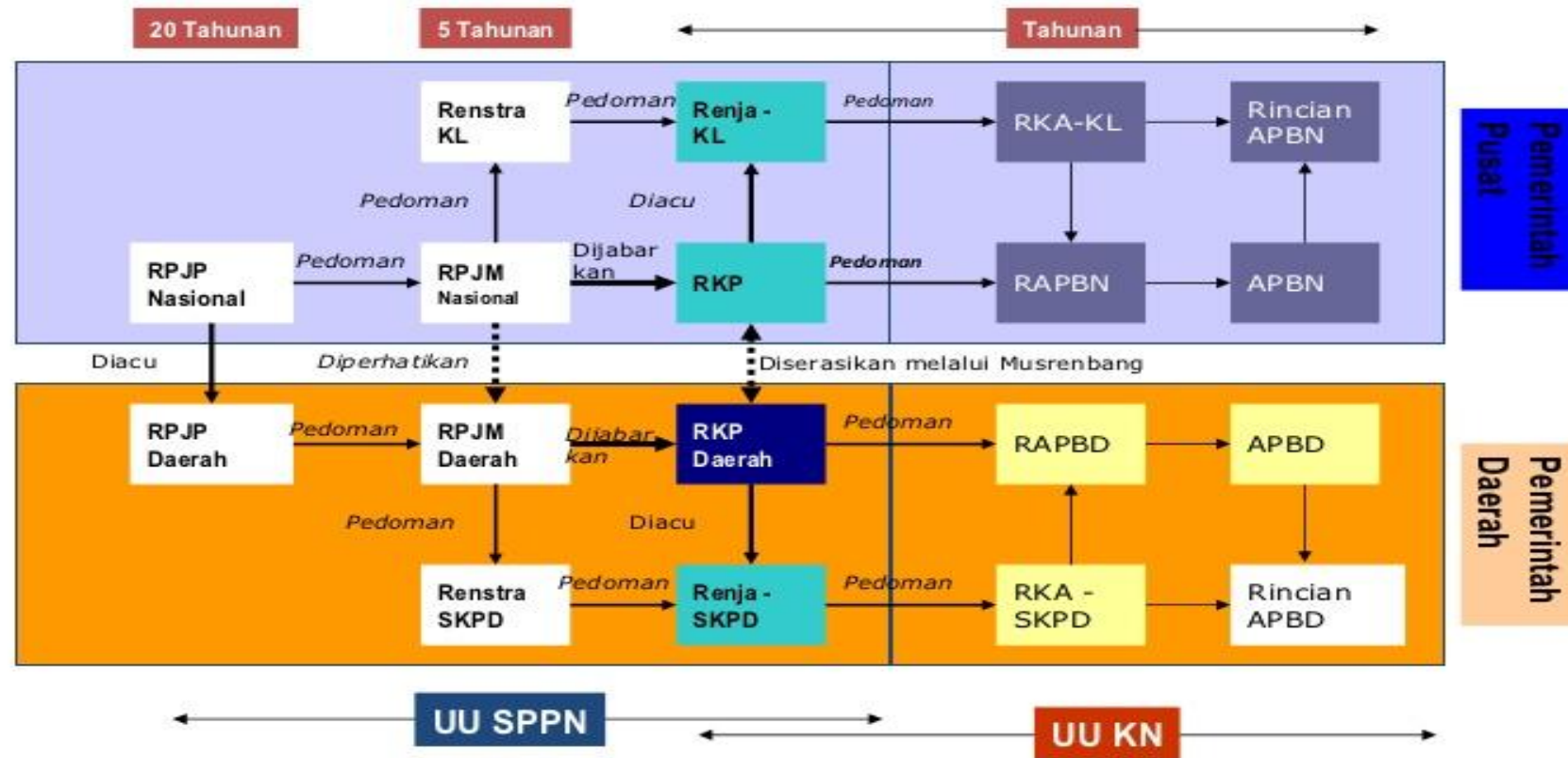


Sumber: Bappenas, 2020: http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18471-18877_RPJMNCostingReportInd.pdf

Bagian 3. Penyusunan Anggaran

Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Siklus APBN

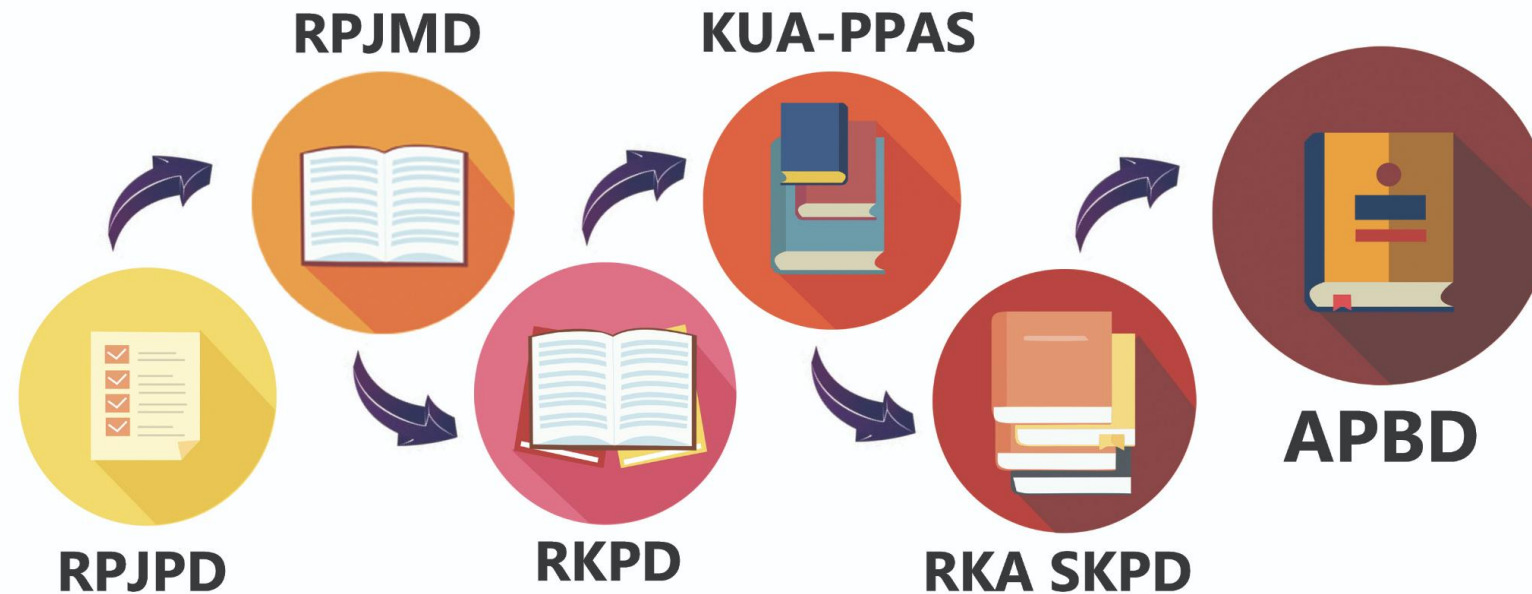


Siklus APBN



Siklus APBD





Titik mana advokasi bisa memperkuat perencanaan dan penganggaran untuk kesehatan

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



- Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
- Disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD
- Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
- Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU
- Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD
- Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup

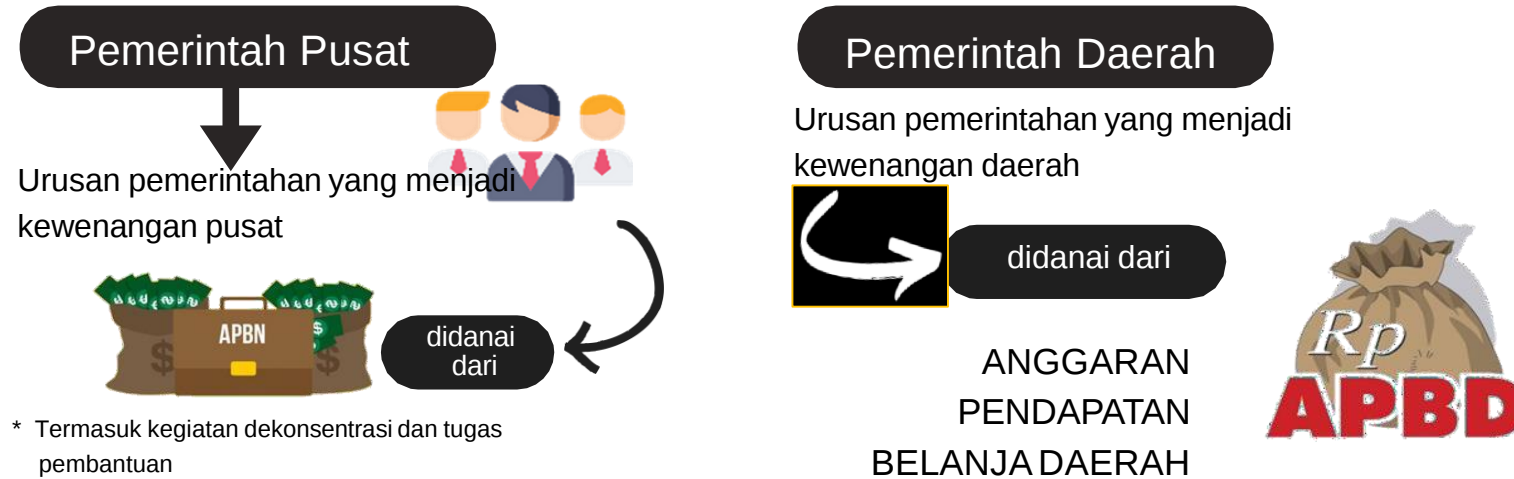
“Money Follows Programs”



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pasal 282 UU 23/2014

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



Prinsip PENGELOLAAN APBD

- 1 disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
- 2 disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD
- 3 Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU
- 4 Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup
- 5 Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
- 6 Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD



SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD harus mempedomani RPJMN

Kata mempedomani bermakna perlu adanya penguatan sinergi dan konsistensi antara perencanaan pusat dan daerah, dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

DASAR HUKUM



ADJAH MADA



1

Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Ketentuan Lebih Lanjut → tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.

2

Beberapa Materi Pokok Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang perlu diintegrasikan kedalam Rancangan Permendagri, Substansi Pengaturan tidak hanya tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 277), tetapi juga mencakup:

a

Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD. Renstra dan Renja PD)

b

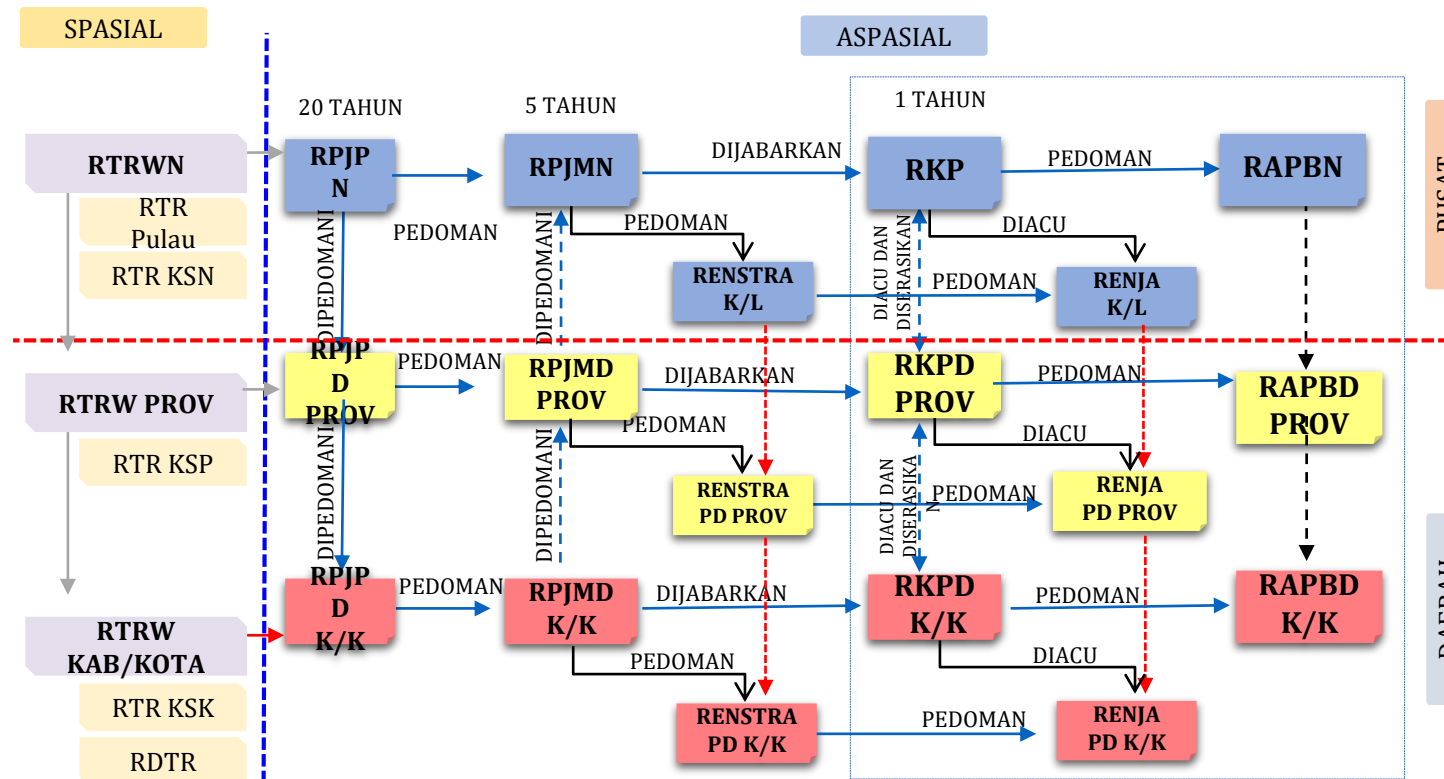
Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD/Perubahan RPJPD dan RPJMD/Perubahan RPJMD.

SUB URUSAN KESEHATAN



Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah

(UU No. 23 Tahun 2014)



1. Sinkronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. Konsistensi

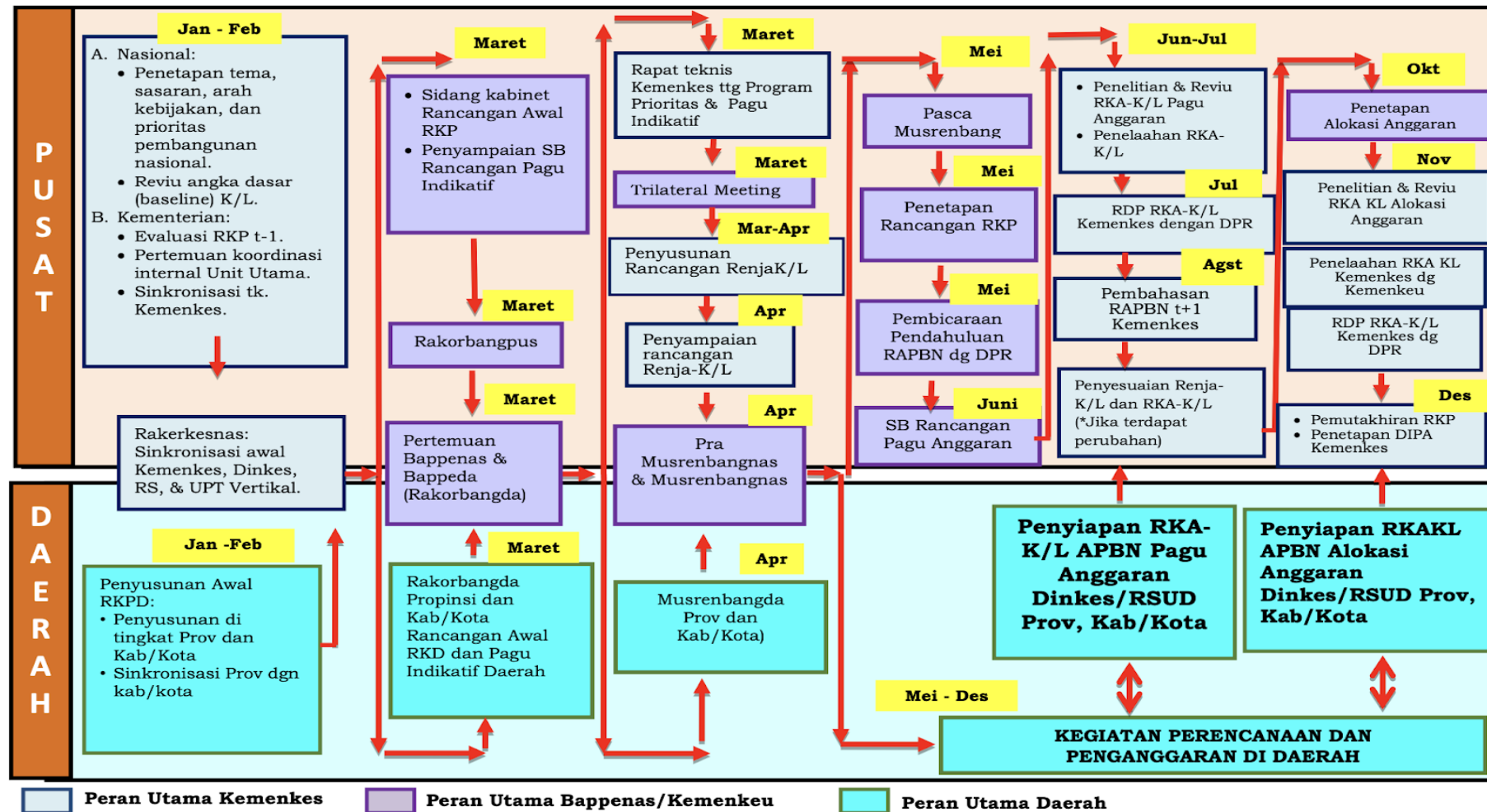
Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

TATA RUANG SEBAGALACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

Siklus Perencanaan - Permenkes

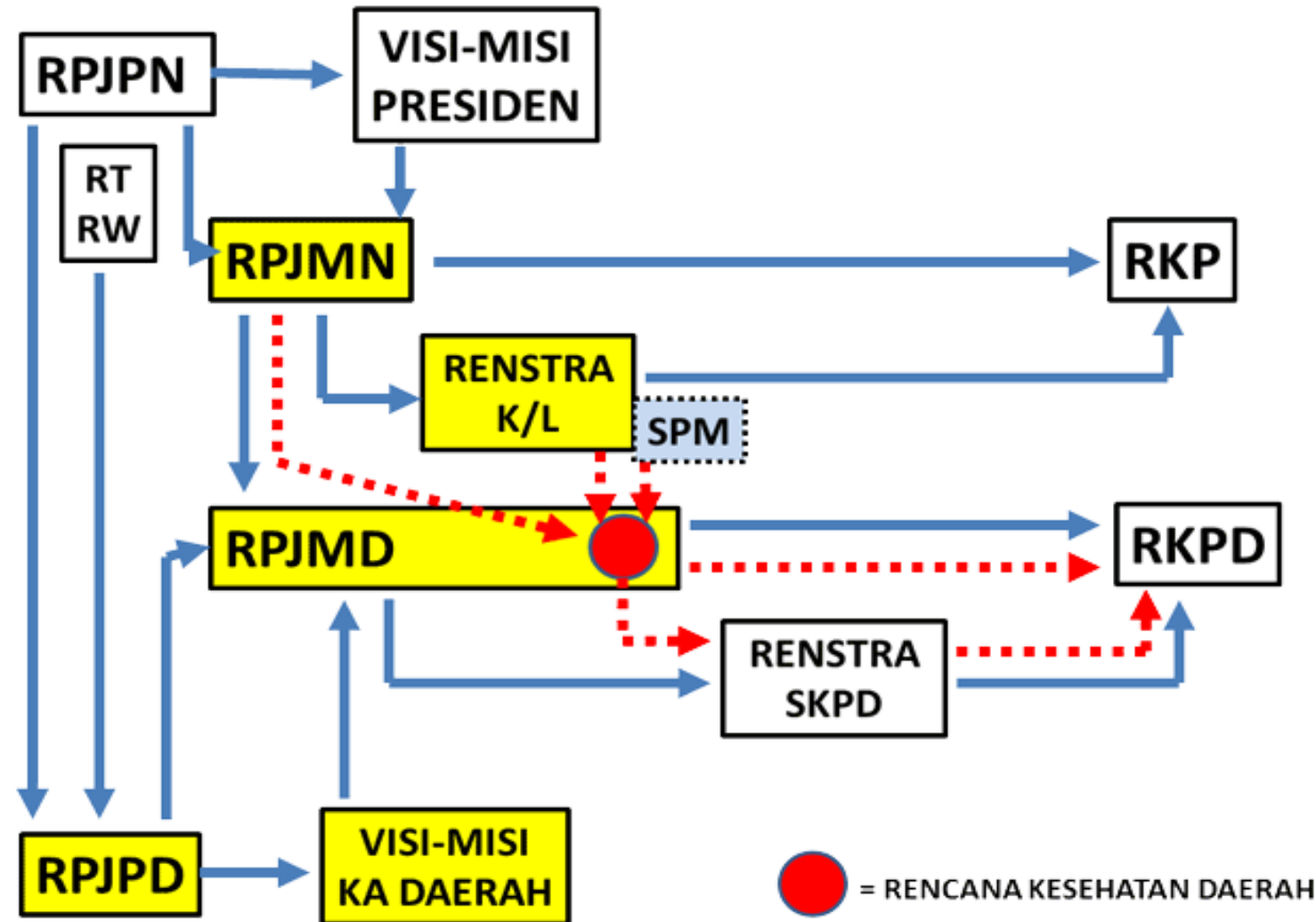


UNIVERSITAS GADJAH MADA



Permenkes No. 48 tahun 2017

ALUR SINKRONISASI & HARMONISASI RPJMN-RPJMD



Penganggaran (budgeting) adalah suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber daya, khususnya sumber daya keuangan.

Anggaran (Budget) adalah pernyataan kuantitatif dari rencana tindakan dan suatu alat bantu untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana.



Jenis Anggaran

- **Traditional Budget:**
 - Appropriation budget
 - Incremental budget
 - Allocative budget
 - Line item
- **Modern Budget (berbasis NPM) :**
 - Planning Programing Budgeting System (PPBS)
 - Zero-Based Budgeting
 - Activity-Based Budgeting
 - Kaizen Budgeting
 - Target-Based Budgeting
 - Outcome-Based Budgeting

- **Planning**, → menggabungkan programming, resource acquisition dan resource allocation.
- **Controlling and Administrating**, → anggaran membantu dlm memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan dibelanjakan sesuai dgn yg direncanakan.
- **Reporting and evaluating**, → anggaran menjadi dasar untuk pelaporan akhir periode dan evaluasi.



Prinsip-prinsip Penganggaran

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
2. **Disiplin anggaran**
3. **Keadilan anggaran**
4. **Efisiensi dan efektivitas anggaran**
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja**



Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) - Definisi

“The Concept of Performance Budgeting assumes that a systematic presentation of performance information alongside budget amounts will improve budget decision-making by refocusing funding choices on program results” (Government Accounting Office (GAO))

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan pendekatan yang sistematis dalam rangka membantu pemerintah menjadi lebih responsif kepada publik dengan cara mengaitkan penganggaran dengan kinerja organisasi

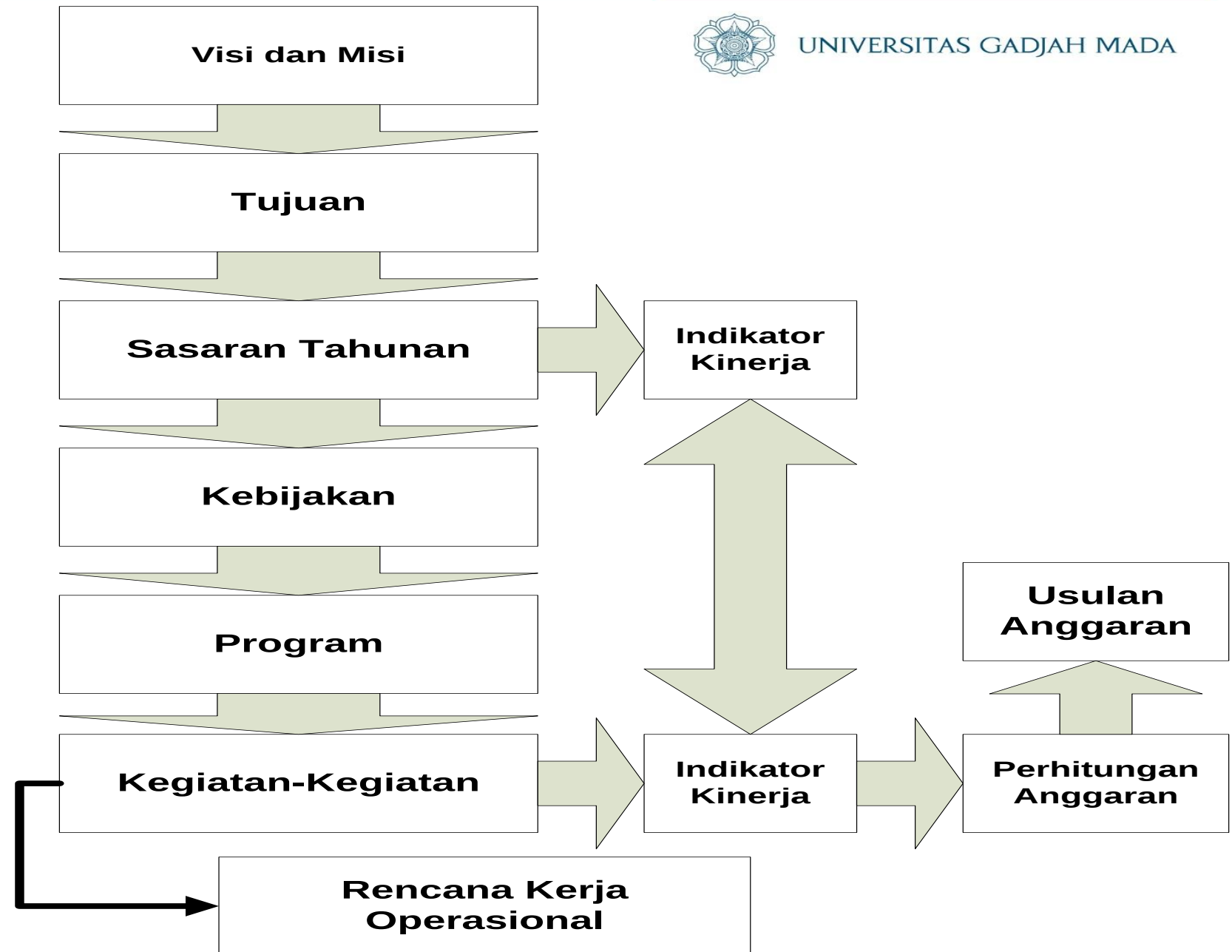


Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja





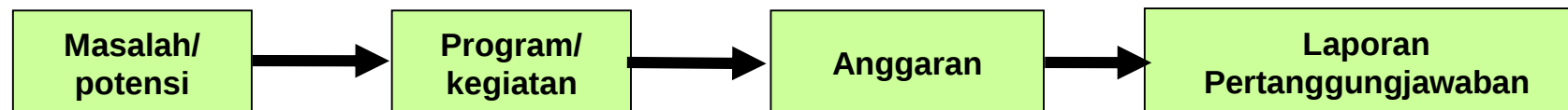
Aliran Anggaran Berbasis Kinerja

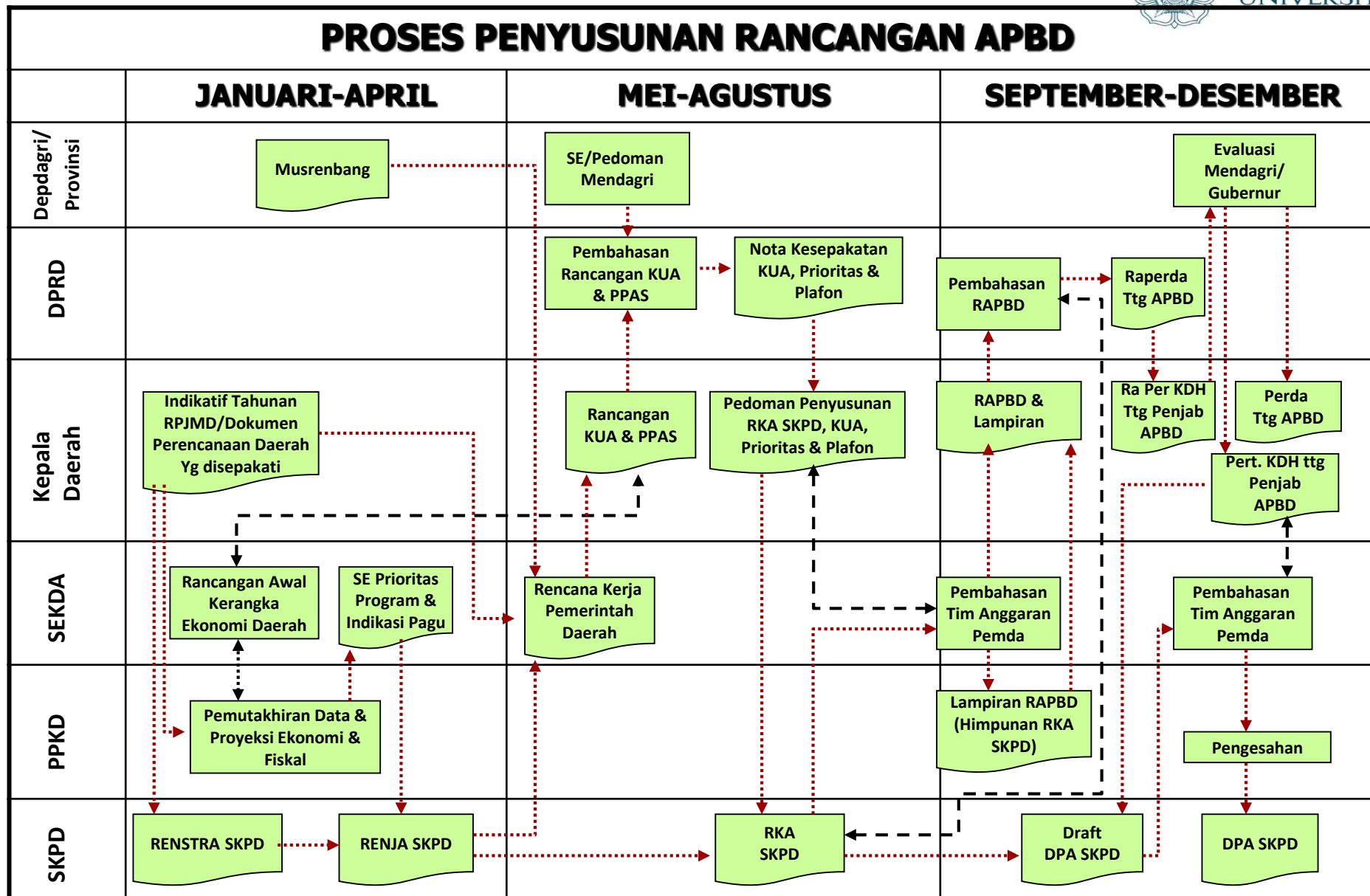


Alur Penganggaran Berbasis Kinerja



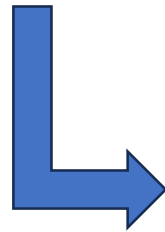
- Identifikasi masalah dan potensi dalam masyarakat
- Menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan potensi melalui program/kegiatan
- Program/kegiatan + indikator kinerja + target kinerja → dikuantitatifkan dalam nilai rupiah (dalam bentuk anggaran)
- Dipertanggungjawabkan melalui LPJ di akhir periode
- LPJ meliputi:
 - **Laporan kuantitatif:** Neraca, APBD, Aliran Kas, Catatan Laporan Keuangan
 - **Laporan kualitatif:** tingkat capaian program/kegiatan dalam satu periode anggaran





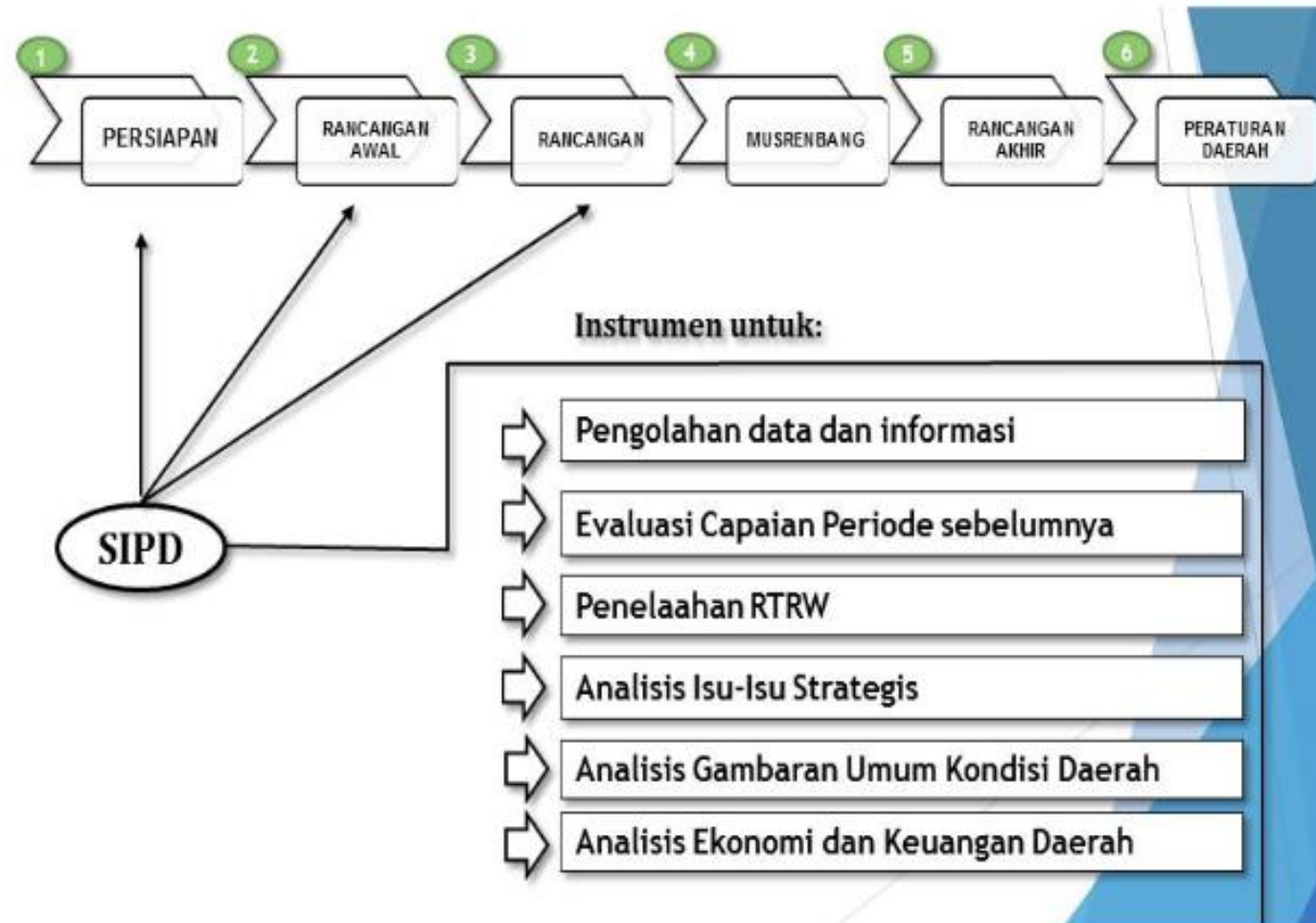


**Penyusunan anggaran
berbasis kinerja**



**Peraturan Menteri Dalam
Negeri 90/2019
PERSPEKTIF DALAM SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD)**

SIPD dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah



Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI, 2018, Frans Dione, Utami Faradina, DOI: <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR SPM PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

**LAMPIRAN
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

AH MADA

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR SPM KAB/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Treinfeksi HIV
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.00/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator	Target			
		Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.00 %			
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.481.326.808 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		90.00 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.481.326.808			
Keluaran	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan		30 %			
Hasil	Dukungan sebesar 30% terhadap Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan		30 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : utpd dinkes						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah						
Lokasi : Kab. Kulon Progo						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target				
	Dokumen rehab gedung Puskesmas Panjatan 1	1 dokumen				
	Rehab gedung Puskesmas Panjatan I	1 unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.804.000
	[#] ATK Kegiatan Pengembangan Puskesmas					Rp1.804.000
	[-] ATK Kegiatan Pengembangan Puskesmas					
	Binder Clip No 107 Spesifikasi :	12 Dus	Dos	6.000	0	Rp72.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map kancing transparan Spesifikasi :	25 Buah	Buah	3.000	0	Rp75.000
	Snelhechter kertas Spesifikasi :	16 Buah	Buah	2.000	0	Rp32.000
	Snelhechter plastik folio Spesifikasi :	14 Buah	Buah	11.000	0	Rp154.000
	Stappler No. 10 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000
	Stappler No. 10 Spesifikasi :	23 Buah	Dos	3.000	0	Rp69.000
	Stopmap kertas polos Spesifikasi :	46 Buah	Buah	1.000	0	Rp46.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi :	4 Buah	Botol	107.000	0	Rp428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.701.000
	[#] Penggandaan Kegiatan Pengembangan Puskesmas					Rp4.701.000
	[-]					
	Foto Copy HVS 70 gr Spesifikasi :	3400 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.020.000
	[-] Penggandaan Dokumen Kontrak					
	Foto Copy HVS 70 gr Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.600.000
	Jilid sambung biasa tebal Spesifikasi :	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	27.000	0	Rp81.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp220.000
	[#] Belanja Materai					Rp220.000
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	20 Buah	Lembar	11.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.125.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp10.125.000
	[-] Jamuan makan koordinasi / monev rehab gedung puskesmas panjatan I					
	Jamuan makan dengan dos/box Spesifikasi : Rapat	15 Orang x 15 Kali	Orang	30.000	0	Rp6.750.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : Rapat	15 Orang x 15 Kali	Orang	15.000	0	Rp3.375.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp831.650.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp831.650.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp831.650.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp831.650.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp831.650.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					Rp40.000.000
	[-] Belanja Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					
	Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					Rp782.000.000
	[-] Belanja Modal bangunan Kesehatan Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					
	Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I Spesifikasi :	1 Unit	Paket	782.000.000	0	Rp782.000.000
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					Rp9.650.000
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Spesifikasi : Pek. Konstruksi 500 jt s/d 1 M	1 Orang x 5 Bulan	OB	1.100.000	0	Rp5.500.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					
	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Spesifikasi : s/d 50 jt	1 Orang x 1 Bulan	Paket	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honor Tim Pendukung Rehab Gedung Puskesmas Panjatan I					

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2023		
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Sasaran Program :		
Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase Posyandu berstatus Purnama dan Mandiri	78 %
Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2023 : Rp452.449.934 (terbilang: empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)		
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Posyandu berstatus Purnama dan Mandiri	78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp452.449.934
Keluaran	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	100 %
Hasil	Persentase Balita Stunting	15 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab Sampang		

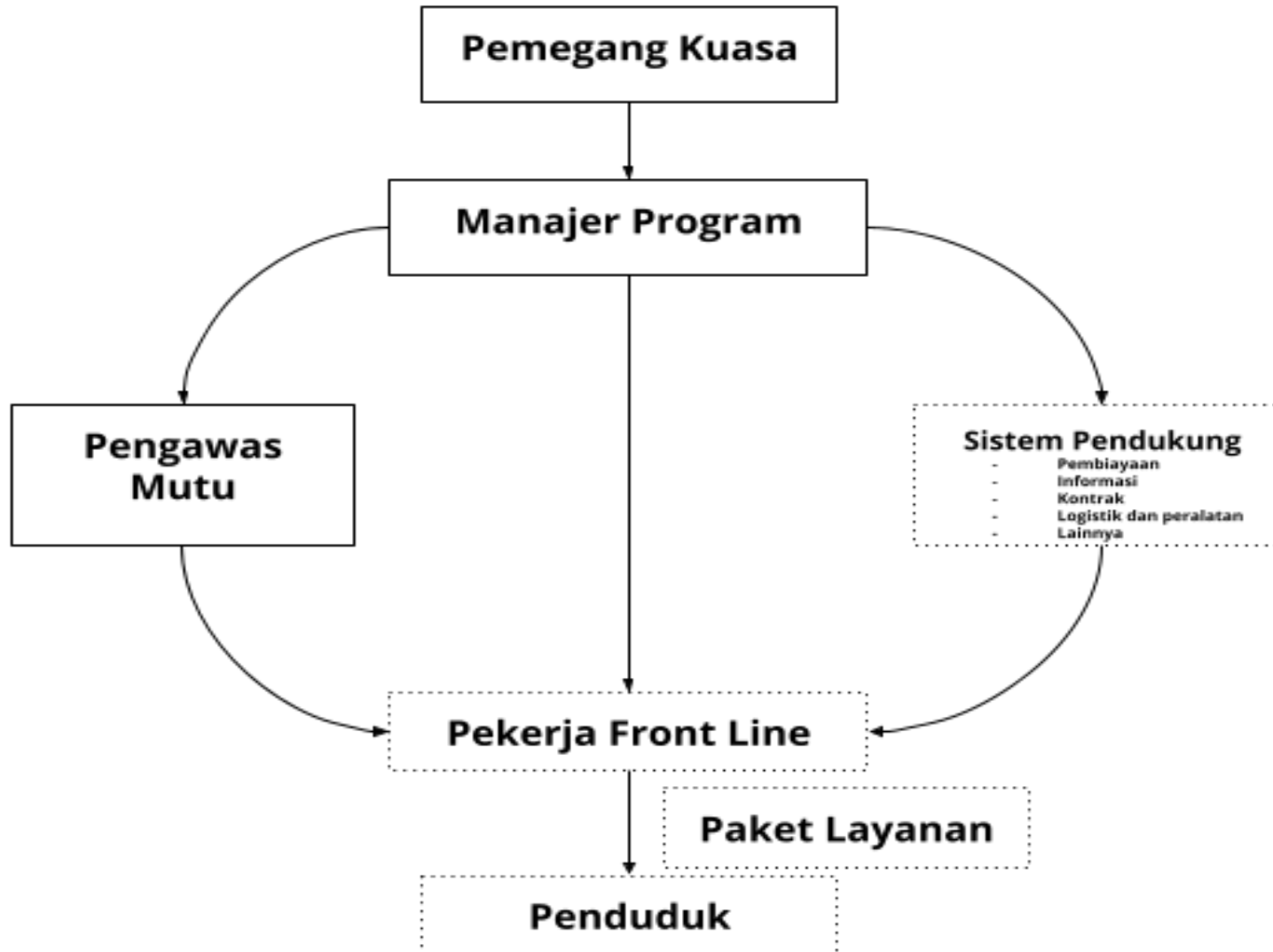
	Belanja jasa					Rp155.400.000
1	Belanja Jasa Kantor					Rp121.350.000
1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.000.000
	[#] BOK Kabupaten Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp5.250.000
	[-] Aksi Bergizi Serentak dalam rangka Peningkatan Konsumsi TTD Remaja Putri					
	Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV	3 Orang x 2 Jam	OJ	375.000	0	Rp2.250.000

BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.2.14.0.00.01.0000 - APBD M Kab. Sampang

Halaman 4 dari 12

Kegiatan	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gerakan Ayo ke Posyandu					
	Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV	1 Orang x 2 Jam x 2 Kali	OJ	375.000	0	Rp1.500.000
	[-] Gerakan Ibu Hamil sehat					
	Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV	1 Orang x 2 Jam	OJ	375.000	0	Rp750.000
	[-] Vaksinasi bersama mitra kelompok masyarakat					
	Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV	1 Orang x 2 Jam	OJ	375.000	0	Rp750.000
	[#] Dana DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.750.000
	[-] Pelatihan KAP stunting bagi Anak Sekolah					
	Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	OJ	375.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi IPT	1 Orang x 2	OJ	750.000	0	Rp3.000.000

Kerangka Bisnis Program Kesehatan



Peningkatan kualitas program dengan alat bantu diagram pelaksanaan program

Bagian penting.....

- Sasaran → penduduk →
 - prioritas → rentan, berisiko, tidak mampu
 - Kondisi menengah
 - Kondisi normal
- Paket layanan → ditujukan kepada siapa?
 - Prioritas
 - Kondisi menengah
 - Kondisi normal
- Pengawasan
 - Internal
 - Eksternal (ahli)

“Knowledge is power, insight is key”



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

ugm.ac.id